

PENGENDALIAN COVID-19 SAAT NATARU

Agar Potensi Wisata DIY Tetap Terkendali

YOGYA (KR) - Pengetatan kegiatan masyarakat saat libur Nataru merupakan langkah untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Jika tidak dikedalikan, dikhawatirkan membuka ruang lonjakan Covid-19 di DIY.

"Pengendalian terhadap laju Covid-19, memang tidak enak. Apalagi kegiatan menjadi terbatas. Tetapi langkah tersebut dapat menyelamatkan potensi usaha masyarakat DIY, khususnya dibidang pariwisata," ujar Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta kepada *KR*, Minggu (5/12).

Menurut Huda, jika kondisi Covid-19 dapat terkontrol, maka diharapkan kondisi sektor pariwisata khususnya pemadasarannya, dapat terjaga dengan baik.

"Khusus DIY kami tidak khawatir jika beberapa hati dikendalikan dan dikedalikan saat liburan, karena kunjungan ke DIY hampir stabil sepanjang tahun, dengan catatan covidnya terkendali," ujar

Huda.

Justru jika tidak terkendali, kata Huda, lonjakan kasus itu akan merugikan ekonomi dan wisata jangka panjang. Kami bersyukur cakupan vaksinasi sudah diatas 80 persen. Harapan kami dinaikkan lagi. Juga diberikan booster untuk warga yang rentan penularan seperti tenaga kesehatan, relawan dan tenaga pendidik atau kependidikan.

"Saya minta agar tenaga pendidik/kependidikan diberikan booster segera karena beberapa pengalaman uji coba pembelajaran tatap muka terjadi cluster, meskipun terkendali," ujarnya.

Dipahami, kebijakan pengetatan tersebut sebagai langkah hati hati

dan antisipatif agar tidak terjadi lonjakan kasus sebagaimana berbagai peristiwa pasca liburan dua tahun ini. Lebih baik kita taat pengetatan satu dua pekan tapi ekonomi tetap berjalan dan membaik daripada kita lepaskan kemudian terjadi lonjakan kasus sebagaimana yang lalu lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji mengatakan, pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 akan bisa dilakukan dengan baik apabila poin-poin yang ada diterapkan. Karena terjadi tidaknya kenaikan kasus saat Nataru dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang dilakukan saat ini.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah 28 kasus sehingga total 156.836 kasus pada Minggu (5/12). (*Jon/Ria/Ira*)-f

TERTINGGI SEPANJANG SEJARAH

Kepercayaan Publik Terhadap Polri 80,2%

JAKARTA (KR) - Hasil survei yang dikeluarkan Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 80,2 persen atau tertinggi selama satu dekade terakhir.

"Angka ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (5/12).

Ia menilai, kehadiran Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di instansi Polri memberikan angin segar di tubuh Polri. Seperti diketahui, Sigit memimpin Korps Bhayangkara sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis.

Menurut Burhanuddin, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hingga menyentuh angka 80,2 persen mengalahkan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini, tidak lepas dari pengaruh sosok Kapolri.

Padahal, biasanya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum

selalu menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di posisi pertama. Tren tersebut terjadi sejak 2014 hingga 2018. "Setelah itu, kepercayaan terhadap KPK terus menurun hingga berimpitan dengan kepercayaan terhadap polisi pada survei 2019 dan 2020," papar Burhanuddin.

Seperti diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2 hingga 6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode *multi-stage random sampling* dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang.

Survei tersebut memiliki *margin of error* sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Lebih rinci, grafik survei kepercayaan masyarakat terhadap Polri sejak 2014 hingga 2021 berdasarkan data Indikator Politik Indonesia, yakni 2014 sebesar 57,5 persen, 2015 mencapai 68,6 persen. Kemudian, pada 2016 (73,2 persen), 2017 (76,5 persen), 2018 (79,8 persen), 2019 (80 persen), 2020 sebesar (72 persen) dan 2021 mencapai 80,2 persen. (*Ant*)-f

ANTISIPASI NATARU DAN OMICRON

Satgas Minta Cermati 6 Indikator

JAKARTA (KR) - Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam masa pandemi Covid-19 ini menjadi periode yang dinilai berpotensi memunculkan lonjakan kasus karena meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan masa libur. Di sisi lain, secara internasional juga muncul ancaman varian baru B.1.1.529 atau Omicron.

Karena itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, meskipun kondisi kasus saat ini sedang terkendali, tetap diperlukan persiapan dengan memantau kondisi Covid-19 dari berbagai aspek. Sedikitnya ada enam indikator yang harus dimonitor secara berkala. Yaitu kasus aktif, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit dan Wisma Atlet, kepatuhan protokol kesehatan (prokes), Rt atau angka reproduksi efektif, mobilitas penduduk dan vaksinasi.

"Meskipun kasus mingguan belakangan

ini menurun, namun jika dilihat pada kasus aktif ternyata sempat mengalami peningkatan empat hari berturut-turut," ujar Wiku di Jakarta kemarin.

Menurutnya, kasus aktif menjadi indikator pertama untuk dicermati. Pada akhir November terjadi peningkatan kasus aktif. BOR ruang isolasi di RS Rujukan angkanya juga sempat meningkat dari 2,94 persen menjadi 3,07 persen. BOR di Wisma Atlet juga meningkat di bulan November, dari 1,76 persen menjadi 2,2 persen. Rt atau angka reproduksi efektif meskipun angkanya di bawah 1, namun perlu diwaspadai trennya dalam lima minggu terakhir meningkat dari 0,96 menjadi 0,98.

Indikator berikutnya yang juga penting, adalah mobilitas penduduk. Dari data, mobilitas kereta api meningkat lima kali lipat dalam lima bulan terakhir. Mobilitas dengan pesawat terbang juga meningkat 350 persen dalam lima bulan terakhir.

Indikator selanjutnya kepatuhan protokol kesehatan. Idealnya, peningkatan aktivitas masyarakat harus dibarengi peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. Sayangnya, data di minggu terakhir November menunjukkan sebaliknya. Cakupan desa/kelurahan yang patuh memakai masker dan menjaga jarak justru menurun. Indikator terakhir, angka cakupan dan laju vaksinasi. Datanya menunjukkan penurunan jumlah suntikan harian selama empat minggu terakhir.

Melihat perkembangan pada indikator-indikator tersebut, berbanding terbalik antara kenaikan jumlah kasus dan upaya preventif di lapangan. Capaian pada indikator tersebut harusnya menjadi refleksi untuk kembali waspada dari seluruh lapisan masyarakat. "Kepada Pemerintah Daerah harus memonitor penerapan prokes dan cakupan vaksinasi di daerahnya masing-masing dan juga daerah sekitarnya," kata Wiku. (*San*)-f

Perluas Mitigasi Importasi Omicron

JAKARTA (KR) - Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI) Jakarta Tjandra Yoga Aditama meminta Pemerintah memperluas mitigasi importasi varian Omicron. Mitigasi disarankan hingga pengecekan riwayat penerbangan dari pelaku perjalanan internasional.

"Harus ada mitigasi berlapis, perlu dilakukan penelusuran kepada mereka yang datang dalam dua atau tiga minggu yang lalu, apakah mereka sekarang sehat saja atau barangkali ada yang sakit yang tentu harus diisolasi dan ditangani dengan seksama, termasuk 'genome sequencing'-nya," kata Tjandra Yoga Aditama, Minggu (5/12).

Pengawasan pada riwayat perjalanan penerbangan, menurut Tjandra, merupakan salah satu mitigasi penting mencegah importasi varian baru Omicron

(B.1.1.529), menyusul laporan kasus yang kian merebak di berbagai negara.

Hingga Kamis (2/12), kata Tjandra, sudah 390 kasus terkonfirmasi Omicron di 31 negara. Sebanyak 15 negara di Eropa dan empat negara di Asia, yakni Hong Kong, Korea Selatan, India dan Singapura.

Mantan Direktur Penanganan Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu mengatakan, European CDC menerima laporan kasus Omicron dari pelaku perjalanan internasional yang tidak memiliki riwayat perjalanan dari negara asal Omicron di Afrika. Laporan itu datang dari Belgia, Jerman dan Inggris. "Ternyata tidak ada riwayat perjalanan ke Afrika sama sekali dan juga tidak ada riwayat kontak dengan kasus yang melakukan perjalanan," ujarnya. (*Ati*)-f

WUJUDKAN WISATA BERKUALITAS BERKELANJUTAN

Tebing Breksi Bertransformasi Bangun Ekosistem Pariwisata Digital



Pesona Tebing Breksi yang menjadi magnet wisatawan.

KR-Fira Nurfiani

TEBING Breksi adalah salah satu destinasi wisata yang tengah mengarah dan bertransformasi menuju ekosistem digital. Destinasi wisata geoheritage yang populer di DIY ini sudah menerapkan transaksi digital atau non tunai dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Bank BPD DIY. Pembayaran non tunai atau cashless tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan dan membangun ekosistem digital di sektor industri pariwisata DIY.

Ketua Pengelola Wisata Tebing Breksi Kholiq Widiyanto mengatakan nasib Tebing Breksi tentunya sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah sejak awal pandemi Covid-19 hingga pengujung 2021. Berbagai kebijakan pengetatan dan pembatasan telah digulirkan pemerintah sampai pada kebijakan PPKM Berlevel saat ini telah berdampak signifikan bagi tempat wisata. Dampak pandemi tersebut mulai tutup untuk sekian lama, adaptasi era baru dan promosi yang membuat jumlah kunjungan wisatawan mulai naik di atas 40 ribu orang atau sudah 50 persen dibandingkan dengan normal. Kemudian muncul PPKM Darurat hingga Berlevel sehingga tempat wisata tutup kembali, setelah PPKM Level 3 hingga Level 2 ini pihaknya melakukan uji coba operasional terbatas.

"Kita banyak didukung oleh

Bank BPD DIY selama uji coba pembukaan terbatas Tebing Breksi, mulai dari rekening tabungan, transaksi non tunai atau digital menggunakan QRIS Bank BPD DIY, Cash Management System (CMS), Mobile Banking dan sebagainya. Kami pun didukung Dinas Pariwisata (Dispar) DIY untuk reservasi tiket secara online menggunakan Visiting Jogja yang didalamnya pembayaran non tunainya mendapatkan potongan harga alias diskon melalui QRIS Bank BPD DIY," tuturnya kepada *KR* saat ditemui di Kopi Breksi, Minggu (5/12).

Kholiq menyatakan upaya mewujudkan ekosistem pariwisata digital di Tebing Breksi ini dimulai dari kehadiran aplikasi Visiting Jogja agar pengunjung beralih membudayakan reservasi tiket secara online. Sehingga memudahkan pengunjung hanya tinggal tapping melalui ponsel pintarnya dan masuk ke area wisata tanpa harus membeli tiket. Dengan reservasi online ini, maka pembayaran tiketnya selalu diarahkan menggunakan QRIS Bank BPD DIY. Namun diakuinya masih banyak pengunjung yang membeli tiket masuk Tebing Breksi sehingga Rp 10.000 per orang maupun melakukan pembayaran di lapak-lapak pedagang secara tunai.

"Kita dimudahkan dan lebih aman dengan adanya pemba-



Pembayaran tiket masuk Tebing Breksi menggunakan QRIS Bank BPD DIY.

KR-Fira Nurfiani

ayaran non tunai hanya dengan scan QR Code dari QRIS Bank BPD DIY ini. Sebab kita tidak perlu memikirkan kembalian dan tidak perlu melakukan kontak fisik dengan pengunjung. Sebelumnya, kita pernah pakai Magic Com untuk memisahkan uang agar aman dari virus Korona. Dengan adanya fasilitas pembayaran dengan QRIS Bank BPD DIY ini kita jadi lebih aman, dimudahkan dan tertolong di tengah pandemi," terangnya.

Pengelola Tebing Breksi ini menyebut, pihaknya tidak hanya operasional Visiting Jogja semata, sebab pengunjung yang masuk diwajibkan scan Peduli Lindungi sehingga pengunjung menggunakan dua aplikasi untuk masuk tempat wisata. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pe-

duli Lindungi sudah terintegrasi dengan Visiting Jogja maka pengunjung tidak perlu ribet lagi menggunakan dua aplikasi masuk ke tempat wisata.

"Banyak manfaat yang kita dapat dengan menggunakan fasilitas QRIS Bank BPD DIY, antara lain tidak perlu menyimpan uang dalam jumlah banyak supaya aman. Pembayaran apapun diharapkan juga via Bank BPD DIY dengan menerapkan CMS karena apa-apa sudah serba digital sehingga lebih dimudahkan dan aman terlebih di masa pandemi seperti ini," tandas Kholiq.

Upaya transformasi menuju ekosistem pariwisata digital berikutnya, pihak manajemen Tebing Breksi juga dukung dari segi pembiayaan dan CMS. Selain

itu, lapak-lapak warung yang ada di Tebing Breksi juga telah menjadi merchant QRIS Bank BPD DIY sehingga memudahkan pengunjung dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pas.

Bank BPD DIY ikut mensupport branding fasilitas jep wisata yang dihimpun dalam koperasi yang hampir dua tahun ini berpuasa akibat pandemi. Dengan kata lain, pihaknya telah banyak dibantu dan didukung penuh Bank BPD DIY, khususnya di tengah pandemi yang memang dengan sendirinya telah menggiring dan mempercepat bertransformasi menuju ekosistem digital.

"Jika dulu banyak platform pembayaran non tunai dengan uang elektronik tetapi masih banyak yang bayar pakai uang tunai, tetapi kini pengunjung sudah beralih ke pembayaran non tunai khususnya generasi milenial. Dengan demikian transaksi pembayaran non tunai di Tebing Breksi terutama pembelian tiket

Secara umum, Tebing Breksi sendiri terus berbenah dan berinovasi seperti perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) seperti penataan atas tebing, perbaikan area parkir, pengerasan jalan dan sebagainya hingga pengembangan fasilitas infrastruktur seperti amphitheater, penataan lapak kuliner, area camping ground, embung dan lainnya yang masih di bawah 50 persen. Dari total luas lahan sekitar 20 Hektare, baru 7 Ha yang dimanfaatkan sehingga masih ada 13 Ha lahan kosong di Tebing Breksi saat ini. Pengelola Tebing Breksi sudah memiliki master plan pengembangan keseluruhan area supaya kegiatan pariwisata bisa berkelanjutan yang diharapkan bisa diperkuat adanya Perdes dengan persetujuan dari Pemkab dan Pemda.

Untuk itu, pengembangan Tebing Breksi masih akan terus dilakukan guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan maupun ekosistem digitalnya. Tebing Breksi ini memang diarahkan sebagai pangung terbuka dengan amphiteaternya karena banyaknya event-event di DIY. Lahan kosong yang masih ada akan dirancah menghadirkan peradaban ke-9 ke abad 21 dilengkapi dengan ciri khas Breksi dengan mini theaternya dan rumah-rumah tempo dulu. Terobosan inilah yang diharapkan bisa menjadikan Tebing Breksi sebagai destinasi wisata berkualitas atau premium yang menjadi daya tarik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman).

"Kita ingin Tebing Breksi menjadi tempat wisata berkualitas yang betul-betul menganut Community Based Tourism (CBT) dan terintegrasi dalam suatu kawasan dengan mengusung konsep konservasi, perawatan, edukasi sampai pemberdayaan masyarakat. Termasuk yang tidak kalah pentingnya mewujudkan ekosistem digital sebab digitalisasi adalah sudah suatu kewajiban jika ingin maju. Kita akan terus mengembangkan digitalisasi dari hulu ke hilir mulai dari sistem digital manajemen, sistem pembukuan, sistem pemasaran, sistem pembayaran, sistem informasi dan lain-lain," pungkas Kholiq. (*Ira*)



KR-Fira Nurfiani

Pembayaran menggunakan QRIS Bank BPD DIY di merchant Kopi Breksi.

sudah banyak menggunakan QRIS Bank BPD DIY. Kami menyiapkan WiFi gratis di semua spot untuk membantu apabila pengunjung kesulitan akses internet di area Tebing Breksi. Pengunjung disarankan terlebih dahulu mengunduh aplikasi Visiting Jogja atau Peduli Lindungi supaya memudahkan dan tidak memakan waktu melakukan reservasi maupun transaksi pembayaran," jelas Kholiq.